



PEMERINTAH
KABUPATEN
KAPUAS HULU

RENCANA KERJA



DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

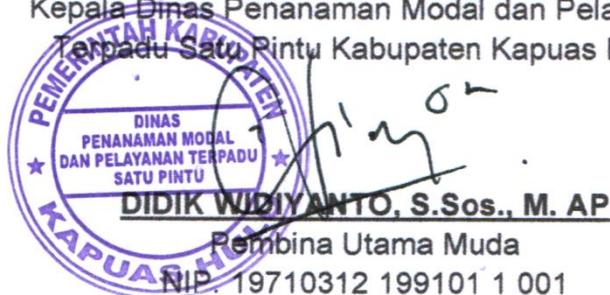
Puji dan Syukur kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nyalah maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 dapat diselesaikan. Penyusunan rencana kerja ini merupakan salah satu kewajiban untuk merencanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance), efisien, efektif, bersih dan responsif serta akuntabel.

Rencana kerja tahun 2019 ini disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dan pencapaian target kinerja yang diharapkan. Rencana kerja ini juga merupakan upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih tahun 2016-2021 yaitu “**Menuju Kapuas Hulu yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis**”, yang pada tahun 2019 ini fokus atau tema pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu “**Kapuas Hulu Berdaya Saing**”.

Dalam penyusunan Rencana kerja ini telah diupayakan untuk mengikuti kaidah serta ketentuan yang berlaku, namun kami tentunya menyadari masih terdapat banyak kekurangan serta perlu adanya perbaikan-perbaikan kedepannya. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan guna kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja kami ini.

Putussibau, 21 Agustus 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu,



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	13
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	14
2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	24
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	25
3.3 Program dan Kegiatan	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	40
BAB V PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan.

Sebagai tindak lanjutnya, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra-SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKP/D serta mengacu pada hasil-hasil Musrenbang.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan.

Di dalam Renja SKPD juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra SKPD dan RKP/D sebagai rencana kerja tahunan daerah.

Dengan adanya Renja SKPD akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program SKPD lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

7. Untuk memberikan arah serta sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahu Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Anggaran Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dengan APBD (murni) sebesar Rp. 3.083.001.100,- dan APBD (perubahan) sebesar Rp. 3.298.653.500,- yang terdiri dari 8 program dan 8 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 3.222.004.279,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 97,68%. Berikut ini disajikan Tabel evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016.

1	02	12	01	01	008	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Lingkungan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan lingkungan gedung kantor	60	12	12	12	100%	12	36	60%
1	02	12	01	01	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara / perbaiki	85	17	17	17	100%	17	51	60%
1	02	12	01	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah item alat tulis kantor	250	50	50	50	100%	50	150	60%
1	02	12	01	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah item barang cetakan dan penggandaan	40	8	8	8	100%	8	24	60%
1	02	12	01	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	375	75	75	75	100%	75	225	60%
1	02	12	01	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	35	7	7	7	100%	7	21	60%
1	02	12	01	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian dan rapat kantor	30.815	6.163	6.163	6.163	100%	6.163	18.489	60%
1	02	12	01	01	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah paket rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5	1	1	1	100%	1	3	60%
1	02	12	01	01	019	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Paket Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	5	1	1	1	100%	1	3	60%
1	02	12	01	01	026	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah orang yang bayar honorarium	15	3	3	3	100%	3	9	60%
1	02	12	01	01	031	Penyusunan RKA, DPA dan DPPA	Jumlah dokumen	15	3	3	3	100%	3	9	60%
1	02	12	01	01	036	Penyediaan Jasa Pendukung perkantoran	Jumlah pegawai honoror yang dibayarkan honorarium	15	3	3	3	100%	3	9	60%
1	02	12	01	02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
						Kegiatan :									

1	02	12	01	02	024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	10	2	2	2	100%	2	6	60%
1	02	12	01	03		Peningkatan Disiplin Aparatur									
						Kegiatan :									
1	02	12	01	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	135	27	27	27	100%	27	81	60%
1	02	12	01	05		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
						Kegiatan :									
1	16	02	01	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	91	12	12	12	100%	12	36	40%
1	02	12	01	06		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
						Kegiatan :									
1	02	12	01	06	002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen	10	2	2	2	100%	2	6	60%
1	02	12	01	06	004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
1	02	12	01	06	021	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Jumlah dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
1	02	12	01	06	042	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD	Jumlah dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
1	02	12	01	06	047	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%

1	02	12	01	15		Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi												
						Kegiatan :												
1	02	12	01	15	013	Pameran Investasi Daerah	Jumlah event pameran yang diikuti	15	5	3	3	100%	2	10	67%			
1	02	12	01	15	019	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	250	N/A	N/A	N/A		N/A		0%			
1	02	12	01	16		Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi												
						Kegiatan :												
1	02	12	01	16	013	Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kab. Kapuas Hulu	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan sosialisasi	15	3	3	3	100%	3	9	60%			
1	02	12	01	16	014	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Pelayanan SPIPISE Kab. Kapuas Hulu	Jumlah paket	5	1	1	1	100%	1	3	60%			
1	02	12	01	16	019	Penyusunan Peta Potensi Investasi Daerah Kab. Kapuas Hulu	Jumlah dokumen	1	0	0	0	0%	0	0	0%			
1	02	12	01	19		Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan												
						Kegiatan :												
1	02	12	01	19	001	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pengawasan	30	3	6	6	100%	3	12	40%			
1	02	12	01	19	014	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pelayanan keliling	30	3	6	6	100%	3	12	40%			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Predikat SAKIP			C	CC	CC	B	C	CC	CC	B	
2.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			75	76	77	78	80	78	77	78	
3.	Nilai realisasi investasi PMDAN (Milyar rupiah)			112	139	173	226	2.710,2	555,78	173	226	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan maupun pelayanan publik yang diselenggarakan. Hal ini tercermin dari hasil survei kepuasan masyarakat yang menemukan masih terjadi gap (jurang) antara harapan masyarakat dengan kemampuan DPM PTSP untuk memberikan layanan. Kendala ini disebabkan adanya keterbatasan dalam sarana dan prasarana kerja yang tersedia, terbatasnya dukungan fasilitas teknologi dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan, aparatur yang belum memiliki kompetensi teknis sebagaimana yang diharapkan, belum optimalnya standarisasi dalam penyelenggaraan pelayanan, dan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk operasional DPM PTSP.

2. Belum optimalnya kinerja perangkat daerah, sebagaimana tercermin dari hasil evaluasi terhadap SAKIP DPM PTSP pada tahun 2016 dengan predkat 'CC', yang mana masih banyak perlu dilakukan perbaikan namun tidak bersifat mendasar. Kendala ini disebabkan berbagai program/kegiatan yang telah ditetapkan tidak dikendalikan dengan baik, keterbatasan pengetahuan aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan dan indikator kerjanya, belum disusunnya pedoman tentang penyusunan dokumen perencanaan di Daerah.
3. Belum efektifnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini tercermin dari belum seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh DPM PTSP, dan tidak ada peningkatan jenis layanan sejak tahun 2012. Kendala ini disebabkan koordinasi dan hubungan kerja antar perangkat daerah belum optimal, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perizinan dalam berusaha, tumpang tindih kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan, belum optimalnya fungsi pengendalian pelayanan perizinan.
4. Belum terciptanya iklim investasi dan berusaha yang kondusif. Hal ini tercermin dari pencapaian nilai realisasi investasi di Kabupaten Kapuas Hulu yang cenderung menurun sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini, meskipun kinerja investasi tahunan lalu melebihi target yang ditetapkan oleh DPM PTSP Provinsi. Hal ini disebabkan belum optimalnya fungsi perencanaan dan promosi investasi, belum optimalnya fungsi pengendalian investasi dan perizinan, kurangnya kesadaran investor untuk tertib usaha, dan kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta belum optimalnya kerjasama pengembangan investasi di daerah dengan berbagai pemangku kepentingan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019

Kabupaten Kapuas Hulu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.410.237.000,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.410.087.000,00	
	Penyediaan jasa surat menyurat > Belanja materai / perangko	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No.04	Tersediannya materai	300 Materai	Rp 1.500.000	Penyediaan jasa surat menyurat > Belanja materai / perangko	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No.04	Tersediannya materai	300 Materai	Rp 1.350.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > Belanja telepon, air, listrik dan internet	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	Rp 35.420.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik > Belanja telepon, air, listrik dan internet	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	Rp 35.420.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional > Pembayaran pajak kendaraan dinas	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional	Pajak 2 Unit mobil dan 12 unit motor	Rp 4.500.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional > Pembayaran pajak kendaraan dinas	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional	Pajak 2 Unit mobil dan 12 unit motor	Rp 4.500.000	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan > Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan jasa operator	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terbayarnya jasa pengelolaan keuangan dan operator	16 Orang	Rp 76.098.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan > Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan jasa operator	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terbayarnya jasa pengelolaan keuangan dan operator	16 Orang	Rp 76.098.000	

	Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terpeliharanya lingkungan gedung kantor	1 Tahun	Rp 29.312.000	Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terpeliharanya lingkungan gedung kantor	1 Tahun	Rp 29.312.000	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terpeliharanya peralatan kantor	20 Unit	Rp 21.600.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terpeliharanya peralatan kantor	20 Unit	Rp 21.600.000	
	Penyediaan alat tulis kantor > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya alat tulis kantor	50 Item	Rp 42.457.000	Penyediaan alat tulis kantor > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya alat tulis kantor	50 Item	Rp 42.457.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	8 Item	Rp 14.850.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	8 Item	Rp 14.850.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	75 Buah	Rp 3.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	75 Buah	Rp 3.000.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit Leptop, 4 Unit Tablet, 1 Set Soun Sistem, 10 Unit Printer	Rp 250.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit Leptop, 4 Unit Tablet, 1 Set Soun Sistem, 10 Unit Printer	Rp 250.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 Surat kabar, 10 Kali Iklan	Rp 18.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 Surat kabar, 10 Kali Iklan	Rp 18.000.000	
	Kegiatan penunjang pemerintah lainnya > -	, Tentative	Terlaksananya kegiatan penunjang pemerintah lainnya	1 Tahun	Rp 30.000.000	Kegiatan penunjang pemerintah lainnya > -	, Tentative	Terlaksananya kegiatan penunjang pemerintah lainnya	1 Tahun	Rp 30.000.000	
	Penyediaan makanan dan minuman > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat kantor	4.720 makanan dan minuman	Rp 54.000.000	Penyediaan makanan dan minuman > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat kantor	4.720 makanan dan minuman	Rp 54.000.000	

	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah > -	, Tentative	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah	50 kali	Rp 466.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah > -	, Tentative	Terlaksananya a rapat-rapat koordinasi keluar daerah	50 kali	Rp 466.000.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah > -	, Tentative	Terlaksananya a rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	30 Kali	Rp 110.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah > -	, Tentative	Terlaksananya a rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	30 Kali	Rp 110.000.000	
	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersediannya honorarium pengadaan barang dan jasa	3 Orang	Rp 3.500.000	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersediannya honorarium pengadaan barang dan jasa	3 Orang	Rp 3.500.000	
	Penyusunan RKA dan DPA > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA SKPD	3 Dokumen	Rp 5.000.000	Penyusunan RKA dan DPA > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA SKPD	3 Dokumen	Rp 5.000.000	
	Penyediaan jasa pendukung kantor > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya jasa tenaga kontrak	5 Orang	Rp 77.000.000	Penyediaan jasa pendukung kantor > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya jasa tenaga kontrak	5 Orang	Rp 77.000.000	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas > -	, Tentative	Terlaksananya a monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas	20 Kali	Rp 168.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Jumlah rapat	4 Kali	Rp 168.000.000	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		0		Rp 1.711.700.000	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		0		Rp 1.711.700.000	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya kendaraan dinas/operasional kantor	1 Unit mobil	Rp 300.000.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya kendaraan dinas/operasional kantor	1 Unit mobil	Rp 300.000.000	
	Perencanaan pembangunan gedung kantor>-	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersediannya Perencanaan pembangunan gedung kantor	1 Paket	Rp 250.000.000	Perencanaan pembangunan gedung kantor>-	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersediannya Perencanaan pembangunan gedung kantor	1 Paket	Rp 250.000.000	

	Pengadaan mebeleur > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya mebeleur kantor	2 set kursi tamu, 10 buah kursi dan meja kerja eselon, 5 set kursi tunngu	Rp 200.000.000	Pengadaan mebeleur > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya mebeleur kantor	2 set kursi tamu, 10 buah kursi dan meja kerja eselon, 5 set kursi tunngu	Rp 200.000.000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor > Pembangunan tempat parkir	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya tempat parkir kendaraan	1 Paket	Rp 200.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor > Pembangunan tempat parkir	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya tempat parkir kendaraan	1 Paket	Rp 200.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terpeliharanya gedung kantor	1 Paket	Rp 150.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terpeliharanya gedung kantor	1 Paket	Rp 150.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	2 Unit mobil, 8 Unit motor	Rp 100.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	2 Unit mobil, 8 Unit motor	Rp 100.000.000	
	Pengadaan peralatan gedung kantor > Penyediaan instalasi jaringan LAN	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya instalasi jaringan LAN	1 Paket	Rp 139.700.000	Pengadaan peralatan gedung kantor > Penyediaan instalasi jaringan LAN	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya instalasi jaringan LAN	1 Paket	Rp 139.700.000	
	Pembangunan pusat data, server aplikasi dan pengamanan	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya pusat data server aplikasi dan pengamanan	1 Paket	Rp 350.000.000	Pembangunan pusat data, server aplikasi dan pengamanan	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya pusat data server aplikasi dan pengamanan	1 Paket	Rp 350.000.000	
	Penilaian kualitas pelayanan publik > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terlaksananya penilaian kualitas pelayanan publik	1 Dokumen	Rp 22.000.000	Penilaian kualitas pelayanan publik > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terlaksananya penilaian kualitas pelayanan publik	1 Dokumen	Rp 22.000.000	
	Program peningkatan disiplin aparatur		0		Rp 88.000.000	Program peningkatan disiplin aparatur		0		Rp 88.000.000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	29 Stel	Rp 45.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	29 Stel	Rp 45.000.000	

	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	29 Stel	Rp 43.000.000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	29 Stel	Rp 43.000.000	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		0		Rp 395.000.000	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		0		Rp 395.000.000	
	Pendidikan dan pelatihan formal > -	, Tentative	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	12 Orang	Rp 395.000.000	Pendidikan dan pelatihan formal > -	, Tentative	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	16 Orang	Rp 395.000.000	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		0		Rp 77.300.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		0		Rp 77.300.000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	Rp 4.500.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	Rp 4.500.000	
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya laporan keuangan semesteran SKPD	1 Dokumen	Rp 5.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya laporan keuangan semesteran SKPD	1 Dokumen	Rp 5.000.000	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Rp 4.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Rp 4.000.000	
	Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja SKPD	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya analisis beban kerja dan analisis jabatan	2 Dokumen	Rp 12.000.000	Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja SKPD	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya analisis beban kerja dan analisis jabatan	2 Dokumen	Rp 12.000.000	
	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya SOP	10 Dokumen	Rp 22.000.000	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya SOP	10 Dokumen	Rp 22.000.000	

	Penyusunan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD	1 Dokumen	Rp 3.000.000	Penyusunan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD	1 Dokumen	Rp 3.000.000	
	Penyusunan DUK dan Daftar Nominatif Pegawai	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya DUK dan Daftar Nominatif Pegawai	1 Dokumen	Rp 8.000.000	Penyusunan DUK dan Daftar Nominatif Pegawai	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya DUK dan Daftar Nominatif Pegawai	1 Dokumen	Rp 8.000.000	
	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya LPPD SKPD	1 Dokumen	Rp 8.000.000	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya LPPD SKPD	1 Dokumen	Rp 8.000.000	
	penyusunan laporan tahunan > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya laporan tahunan SKPD	1 Dokumen	Rp 7.000.000	penyusunan laporan tahunan > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya laporan tahunan SKPD	1 Dokumen	Rp 7.000.000	
	Penyusunan Laporan Inventarisasi aset SKPD	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya laporan inventarisasi aset SKPD	2 Dokumen	Rp 3.800.000	Penyusunan Laporan Inventarisasi aset SKPD	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya laporan inventarisasi aset SKPD	2 Dokumen	Rp 3.800.000	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		0		Rp 744.000.000	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		0		Rp 744.000.000	
	Pameran investasi daerah > -	, Tentative	Terlaksananya pameran investasi daerah	3 Minat investor	Rp 290.000.000	Pameran investasi daerah > -	, Tentative	Terlaksananya a pameran investasi daerah	3 Minat investor	Rp 290.000.000	
	Penyusunan data statistik penanaman modal	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya data statistik penanaman modal	1 Dokumen	Rp 75.000.000	Penyusunan data statistik penanaman modal	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya data statistik penanaman modal	1 Dokumen	Rp 75.000.000	
	Pengelolaan sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID)	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya informasi potensi investasi daerah (SIPID)	2 Kegiatan	Rp 20.000.000	Pengelolaan sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID)	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya informasi potensi investasi daerah (SIPID)	2 Kegiatan	Rp 20.000.000	

	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal > -	, Tentative	Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	45 Perusahaan	Rp 279.000.000	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal > -	, Tentative	Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	45 Perusahaan	Rp 279.000.000	
	Penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya sarana dan prasarana promosi penanaman modal	450 Leaflet, 300 brosur, 50 Buah CD	Rp 80.000.000	Penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Tersedianya sarana dan prasarana promosi penanaman modal	450 Leaflet, 300 brosur, 50 Buah CD	Rp 80.000.000	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		0		Rp 520.000.000	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		0		Rp 520.000.000	
	Pengembangan dan pemeliharaan sarana pelayanan SPIPISE Kab. KH > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terpeliharanya sarana pelayanan SPIPISE Kab. KH	1 Paket	Rp 76.000.000	Pengembangan dan pemeliharaan sarana pelayanan SPIPISE Kab. KH > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terpeliharanya sarana pelayanan SPIPISE Kab. KH	1 Paket	Rp 76.000.000	
	Workshop penyusunan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terlaksananya workshop penyusunan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	30 Perusahaan	Rp 50.000.000	Workshop penyusunan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terlaksananya workshop penyusunan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	30 Perusahaan	Rp 50.000.000	
	Sosialisasi kebijakan penanaman modal > -	, Tentative	Terlaksananya sosialisasi kebijakan penanaman modal	50 Perusahaan	Rp 34.000.000	Sosialisasi kebijakan penanaman modal > -	, Tentative	Terlaksananya sosialisasi kebijakan penanaman modal	50 Perusahaan	Rp 34.000.000	
	Penyusunan kebijakan penanaman modal	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terlaksananya penyusunan kebijakan penanaman modal	1 Dokumen	Rp 75.000.000	Penyusunan kebijakan penanaman modal	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terlaksananya penyusunan kebijakan penanaman modal	1 Dokumen	Rp 75.000.000	
	Rapat koordinasi teknis perencanaan penanaman modal	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terlaksananya rapat koordinasi teknis perencanaan	3 Kali	Rp 85.000.000	Rapat koordinasi teknis perencanaan penanaman modal	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terlaksananya rapat koordinasi teknis perencanaan	3 Kali	Rp 85.000.000	

			penanaman modal					penanaman modal			
	Penyusunan ICOR Kab. Kapuas Hulu	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terlaksananya Penyusunan ICOR Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp 200.000.000	Penyusunan ICOR Kab. Kapuas Hulu	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terlaksananya Penyusunan ICOR Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	Rp 200.000.000	
	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		0		Rp 688.000.000	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		0		Rp 688.000.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan > -	, Tentative	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan	5 Kecamatan	Rp 178.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan > -	, Tentative	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan	5 Kecamatan	Rp 178.000.000	
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Keliling > -	, Tentative	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan keliling Kab. KH	3 Kecamatan	Rp 234.000.000	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Keliling > -	, Tentative	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan keliling Kab. KH	3 Kecamatan	Rp 234.000.000	
	Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) OPD > -	, Kabupaten Kapuas Hulu	Tersedianya IKM OPD	Baik	Rp 87.000.000	Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) OPD > -	, Kabupaten Kapuas Hulu	Tersedianya IKM OPD	Baik	Rp 87.000.000	
	Penataan perizinan > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terlaksananya penataan perizinan	1 Dokumen	Rp 64.000.000	Penataan perizinan > -	PUTUSSIBA U UTARA, Jln. Antasari No. 04	Terlaksananya penataan perizinan	1 Dokumen	Rp 64.000.000	
	Fasilitasi dan koordinasi tentang pengaduan masyarakat > -	, Kabupaten Kapuas Hulu	Pengaduan yang ditangani dan ditindaklanjuti	3 Pengaduan	Rp 25.000.000	Fasilitasi dan koordinasi tentang pengaduan masyarakat > -	, Kabupaten Kapuas Hulu	Pengaduan yang ditangani dan ditindaklanjuti	3 Pengaduan	Rp 25.000.000	
	Publikasi dan informasi perizinan dan non perizinan > -	, Kabupaten Kapuas Hulu	Terlaksananya publikasi dan informasi perizinan dan non perizinan	2 Publikasi	Rp 100.000.000	Publikasi dan informasi perizinan dan non perizinan > -	, Kabupaten Kapuas Hulu	Terlaksananya publikasi dan informasi perizinan dan non perizinan	2 Publikasi	Rp 100.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari hasil forum SKPD yang telah dilaksanakan tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada usulan program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal merupakan kebijakan yang diperintahkan oleh Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, PTSP dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Dalam Undang-Undang tersebut,PTSP diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Pengertian ini berbeda dengan pengertian "pelayanan terpadu satu atap". Dalam Keputusan Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, pengertian "pelayanan terpadu satu atap" adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat untuk berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu, sedangkan "pelayanan satu pintu" adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.

PTSP di tingkat pusat dilakukan oleh lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat Pusat, Propinsi atau Kabupaten/Kota. Lembaga yang dimaksud disini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah). Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar

instansi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, maupun antar Pemerintah Daerah. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal tersebut dilakukan oleh BKPM. Dalam melaksanakan PTSP, BKPM harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 di atas, pada tingkat nasional telah terdapat “payung” bagi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. Hal yang berkaitan dengan apa itu pelayanan terpadu satu pintu, tujuan pembentukannya, kelembagaannya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur lebih tegas. Ketegasan ini dapat menciptakan kepastian bagi aparat pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, kepastian bagi penanam modal, dan kepastian bagi masyarakat umum. Meskipun demikian, pengaturan “payung” tersebut tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara pelayanan terpadu satu pintu. Undang-Undang hanya mengatur pelayanan terpadu satu pintu secara umum dan memerintahkan penyusunan Peraturan Presiden untuk mengatur tata cara dan pelaksanaannya.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu
2. Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan pada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang telah dicapai saat ini, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, meningkatkan kompetensi aparatur, dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang telah dimiliki.

Tujuan 2 : Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan pada upaya untuk meningkatkan fungsi perencanaan penanaman modal, mengoptimal promosi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, mengoptimal proses perizinan penanaman modal, dan meningkatkan fungsi pengendalian investasi.

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.

Adapun Sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PMPTSP Kab Kapuas Hulu

2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan DPM PTSP Kab. Kapuas Hulu
3. Meningkatkan realisasi investasi di Daerah

Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kab Kapuas Hulu diarahkan pada upaya meningkatkan predikat nilai evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan tiga Program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Selanjutnya Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas pelayanan yang diselenggarakan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu diarahkan pada upaya meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal, yang mana didukung dengan 3 program, yaitu :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
3. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

Kemudian Sasaran 3 : Meningkatkan realisasi investasi di Daerah diarahkan pada upaya meningkatkan nilai realisasi investasi di daerah baik Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, yang mana didukung dengan dua program, yaitu :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;

Keterkaitan antara Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam masa periode renstra (2016-2021) serta indikator kerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.1

Tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu periode Renstra (2016-2021)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas Pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Predikat SAKIP	CC	CC	CC	B	B	BB
		Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	76	77	78	79	80
2.	Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu	Meningkatkan realisasi investasi di Daerah	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar rupiah)	112	139	173	226	299	398

Dari tabel diatas, indikator predikat sakip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019 ditargetkan berpredikat B. Untuk indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2019 ditargetkan dengan nilai Baik, dan indikator nilai realisasi investasi sebesar 226 Milyar.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 8 program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran, meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasional kantor, serta meningkatnya profesionalisme aparatur. Program pelayanan administrasi perkantoran kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
5. Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Lingkungan Kantor;
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
12. Penyediaan Makanan dan Minuman;
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
14. Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
15. Penyediaan administrasi Pengadaan Barang dan Jasa;
16. Penyusunan RKA dan DPA ;
17. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran;
18. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas;
19. Kegiatan Penunjang Program Pemerintah Lainnya;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur bertujuan mewujudkan peningkatan kinerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
2. Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor;
3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

4. Pengadaan Meubeleur;
5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
7. Penyediaan Instalasi Jaringan LAN;
8. Pembangunan Pusat Data, Server Aplikasi dan Pengamanan;
9. Penilaian Kualitas Pelayanan Publik;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan mewujudkan peningkatan produktivitas kerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya;
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu dalam memberikan pelayanan publik sehingga menjadi aparatur yang profesionalisme. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dapat dijabarkan pada kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan bertujuan untuk meningkatkan peran dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD dan Prognosis Realisasi Anggaran;
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
4. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
6. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD;
7. Penyusunan Daftar Nominatif Pegawai dan DUK;
8. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD;
9. Penyusunan Laporan Tahunan;
10. Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset;

6. *Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi*

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan promosi penanaman modal. Program Peningkatan dan pengembangan promosi penanaman modal dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pameran investasi Daerah;
2. Penyusunan Data Statistik Publikasi Penanaman Modal;
3. Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID);
4. Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;

7. *Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi*

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi bertujuan untuk mendorong kegiatan investasi agar implementasi pembangunan dapat berjalan lancar/cepat, aman dan efisien. Program peningkatan iklim dan realisasi investasi dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Pelayanan SPIPISE Kab. Kapuas Hulu;
2. Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
3. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal;
4. Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal;
5. Rapat Koordinasi Teknis Penanaman Modal;
6. Penyusunan ICOR;

8. *Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan*

Hasil yang diharapkan dari program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam kepengurusan perizinan dan non perizinan. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan;
2. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling Kab. Kapuas Hulu;
4. Penataan Perizinan;
5. Fasilitasi dan Koordinasi Pengaduan Masyarakat;
6. Publikasi dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan;

Indikasi pendanaan program dan kegiatan Dinas PMPTSP didasarkan kepada program dan kegiatan yang efeknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat atau stakeholder terkait. Rumusan rencana program dan kegiatan Renja Dinas PMPTSP Tahun 2019 tergambar pada tabel berikut :

Tabel. 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Kapuas Hulu

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
1	02					Urusan Penanaman Modal							
1	02	12				Penanaman Modal							
1	02	12	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tindakan lanjut hasil pemeriksaan		100%			100%	
							Nilai evaluasi pelayanan publik		Cukup baik			Baik	
						Kegiatan :							
1	02	12	01	01	001	Belanja Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai/perangko	Kab. Kapuas Hulu	300 Materai	1.350.000	APBD	300 Materai	1.350.000
1	02	12	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran Listrik, PDAM, Telepon dan Internet / Tahun	Kab. Kapuas Hulu	12 Bulan	35.420.000	APBD	12 Bulan	38.962.000
1	02	12	01	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajak / Tahun	Kab. Kapuas Hulu	2 Unit Mobil	4.500.000	APBD	2 Unit Mobil	4.500.000
1	02	12	01	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang yang dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan dan Jasa Operator	Kab. Kapuas Hulu	16 OB	76.098.000	APBD	16 OB	83.707.000
1	02	12	01	01	008	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan lingkungan gedung kantor	Kab. Kapuas Hulu	12 Bulan	29.312.000	APBD	12 Bulan	32.243.000

1	02	12	01	01	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara/perbaiki	Kab. Kapuas Hulu	20 Unit	21.600.000	APBD	25 Unit	28.700.000
1	02	12	01	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah item alat tulis kantor	Kab. Kapuas Hulu	50 Item	42.457.000	APBD	50 Item	60.960.000
1	02	12	01	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah item Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kapuas Hulu	8 item	14.850.000	APBD	8 item	17.500.000
1	02	12	01	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Kab. Kapuas Hulu	75	3.000.000	APBD	75	3.300.000
1	02	12	01	01	013	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan / tahun	Kab. Kapuas Hulu	4 Unit Leptop, 4 Unit Tablet, 1 set soun sistem, 10 unit printer	250.000.000	APBD	8 Unit printer, 2 set infokus, 2 unit camera, 2 unit AC	150.000.000
1	02	12	01	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kapuas Hulu	6 surat kabar, 1 iklan	18.000.000	APBD	6 surat kabar, 1 iklan	19.800.000
1	02	12	01	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Harian/Rapat Kantor	Kab. Kapuas Hulu	6.163	54.000.000	APBD	6.163	59.400.000
1	02	12	01	01	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah paket rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tentative	1 Paket	466.000.000	APBD	1 Paket	512.600.000
1	02	12	01	01	019	Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Paket Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Tentative	1 Paket	110.000.000	APBD	1 Paket	121.000.000
1	02	12	01	01	026	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah orang yang dibayar honorarium	Kab. Kapuas Hulu	3 orang	3.500.000	APBD	3 orang	3.850.000
1	02	12	01	01	031	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	3 Dokumen	5.000.000	APBD	3 Dokumen	5.500.000
1	02	12	01	01	036	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Jumlah pegawai honorer yang dibayarkan honorarium	Kab. Kapuas Hulu	4 Orang	77.000.000	APBD	4 Orang	84.700.000
1	02	12	01	01	042	Monitoring dan evaluasi kegiatan dinas	Jumlah paket money	Tentative	1 paket	168.000.000	APBD	1 paket	184.800.000

1	02	12	01	01	xxx	Kegiatan Penunjang Pemerintah Lainnya	Jumlah paket bantuan	Kab. Kapuas Hulu	1 Paket	30.000.000	APBD	1 Paket	32.100.000
1	02	12	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		80%	1.711.700.000		80%	5.775.000.000
1	02	12	01	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	Kab. Kapuas Hulu	1 Unit Mobil	300.000.000	APBD	4 Unit motor	120.000.000
1	02	12	01	02	xxx	Perencanaan pembangunan gedung kantor	Jumlah Paket	Kab. Kapuas Hulu	1 Paket	250.000.000	APBD	0	-
1	02	12	01	02	07	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah paket pengadaan gedung kantor	Kab. Kapuas Hulu		-	APBD	1 Paket	5.000.000.000
1	02	12	01	02	09	Penyediaan sarana pendukung Gedung Kantor	Jumlah paket penyediaan sarana pendukung gedung kantor	Kab. Kapuas Hulu	1 Paket pembangunan tempat parkir	200.000.000	APBD	1 Paket Pembangunan pagar kantor	380.000.000
1	02	12	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang akan diadakan	Kab. Kapuas Hulu	2 set kursi tamu, 10 buah kursi dan meja kerja eselon, 5 set kursi tunggu	200.000.000	APBD	4 unit lemari buku, 8 buah filling kabinet, 17 buah kursi staf	100.000.000
1	02	12	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah paket Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Kab. Kapuas Hulu	1 Paket	150.000.000	APBD	-	-
1	02	12	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	Kab. Kapuas Hulu	2 Unit Mobil, 8 unit motor	100.000.000	APBD	2 Unit mobil, 16 unit motor	150.000.000
1	02	12	01	02	xxx	Penyediaan instalasi jaringan komunikasi data	Jumlah paket Penyediaan instalasi jaringan komunikasi data	Kab. Kapuas Hulu	1 Paket	139.700.000	APBD	-	-
1	02	12	01	02	xxx	Pembangunan pusat data, server aplikasi dan pengamanan	Jumlah paket	Kab. Kapuas Hulu	1 paket	350.000.000	APBD	-	-

1	02	12	01	02	xxx	Penilaian kualitas pelayanan publik	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	22.000.000	APBD	1 Dokumen	25.000.000
1	02	12	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun		95%	88.000.000		97,50%	96.800.000
1	02	12	01	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	Kab. Kapuas Hulu	29 Stel	45.000.000	APBD	29 Stel	49.500.000
1	02	12	01	03	005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Harian Putih	Kab. Kapuas Hulu	29 Stel	43.000.000	APBD	29 Stel	47.300.000
1	02	12	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		80%	395.000.000		80%	434.500.000
1	02	12	01	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Tentative	16 Orang	395.000.000	APBD	16 Orang	434.500.000
1	02	12	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP OPD	Kab. Kapuas Hulu	B	77.300.000		B	84.010.000
1	02	12	01	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	4.500.000	APBD	1 Dokumen	4.950.000
1	02	12	01	06	002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan prognos realisasi anggaran	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dokumen	5.000.000	APBD	2 Dokumen	5.500.000
1	02	12	01	06	004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	4.000.000	APBD	1 Dokumen	4.400.000

1	02	12	01	06	xxx	Penyusunan Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dokumen	12.000.000	APBD	2 Dokumen	12.840.000
1	02	12	01	06	xxx	Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	10 Dokumen	22.000.000	APBD	10 Dokumen	23.540.000
1	02	12	01	06	030	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	3.000.000	APBD	1 Dokumen	3.300.000
1	02	12	01	06	xxx	Penyusunan DUK dan Daftar Nominatif Pegawai	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dokumen	8.000.000	APBD	2 Dokumen	8.800.000
1	02	12	01	06	042	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	8.000.000	APBD	1 Dokumen	8.800.000
1	02	12	01	06	047	Penyusunan Laporan Tahunan	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	7.000.000	APBD	1 Dokumen	7.700.000
1	02	12	01	06	087	Penyusunan Inventarisasi aset SKPD	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	2 Dokumen	3.800.000	APBD	2 Dokumen	4.180.000
1	02	12	01	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah minat investor		3	744.000.000		3	797.380.000
1	02	12	01	15	013	Pameran Investasi Daerah	Jumlah minat investor	Tentative	3 Investor	290.000.000	APBD	3 Investor	311.000.000
1	02	12	01	15	xxx	Penyusunan Data Statistik Publikasi Penanaman Modal	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	75.000.000	APBD	1 Dokumen	80.250.000
1	02	12	01	15	xxx	Pengelolaan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Jumlah laporan	Kab. Kapuas Hulu	4 Laporan	20.000.000	APBD	4 Laporan	22.000.000
1	02	12	01	15	019	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Kab. Kapuas Hulu	45 Perusahaan	279.000.000	APBD	45 Perusahaan	298.530.000
1	02	12	01	15	xxx	Penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal	Jumlah bahan pameran berupa leaflet, brosur dan CD	Kab. Kapuas Hulu	450 leaflet, 300 brosur, 50 CD	80.000.000	APBD	500 leaflet, 300 brosur, 50 CD	85.600.000

1	02	12	01	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM		50 Perusahaan	520.000.000		50 Perusahaan	974.550.000
1	02	12	01	16	xxx	Pengadaan SIMYANDU	Jumlah sistem	Kab. Kapuas Hulu		-	APBD	1 Sistem	300.000.000
1	02	12	01	16	013	Sosialisasi Peraturan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Kecamatan yang mendapat sosialisasi	Kab. Kapuas Hulu		-	APBD	23 Kecamatan	200.000.000
1	02	12	01	16	014	Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Spipise Kab. KH	Jumlah paket	Kab. Kapuas Hulu	1 Paket	76.000.000	APBD	1 Paket	83.600.000
1	02	12	01	16	015	Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diundang kegiatan wokshop	Kab. Kapuas Hulu	50 Perusahaan	50.000.000	APBD		-
1	02	12	01	16	018	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi	Kab. Kapuas Hulu	50 Perusahaan	34.000.000	APBD		-
1	02	12	01	16	xxx	Penataan dan Perumusan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	75.000.000	APBD		-
1	02	12	01	16	xxx	Rapat Koordinasi teknis perencanaan penanaman modal	Jumlah koordinasi penanaman modal	Tentative	3 kali	85.000.000	APBD	3 kali	90.950.000
1	02	12	01	16	xxx	Penyusunan rencana kebutuhan investasi	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu		-	APBD	1 Dokumen	300.000.000
1	02	12	01	16	xxx	Penyusunan ICOR Kab. Kapuas hulu	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	200.000.000	APBD		-
1	02	12	01	19		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Rata-rata waktu penyelesaian perizinan		3-5 Hari	688.000.000		3-5 Hari	731.750.000
1	02	12	01	19	001	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan	Kab. Kapuas Hulu	5 Kecamatan	178.000.000	APBD	4 Kecamatan	191.000.000
1	02	12	01	19	001	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD	Jumlah Dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	87.000.000	APBD	1 Dokumen	89.000.000

1	02	12	01	19	014	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Keliling	Jumlah kecamatan yang dilakukan pelayanan keliling	Kab. Kapuas Hulu	3 Kecamatan	234.000.000	APBD	3 Kecamatan	250.000.000
1	02	12	01	19	017	Penataan Perizinan	Jumlah dokumen	Kab. Kapuas Hulu	1 Dokumen	64.000.000	APBD	1 Dokumen	68.000.000
1	02	12	01	19	xxx	Fasilitasi dan Koordinasi tentang Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang ditangani	Kab. Kapuas Hulu	3	25.000.000	APBD	3	26.750.000
1	02	12	01	19	xxx	Publikasi dan Informasi Perizinan dan non Perizinan	Jumlah publikasi	Kab. Kapuas Hulu	2 Publikasi	100.000.000	APBD	2 Publikasi	107.000.000
Jumlah										5.634.087.000			10.338.962.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integrasi untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu merumuskan 8 Program yang akan dilaksanakan agar Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan guna pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program tersebut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; dan
8. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2018 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2019, dimana Renja Tahun 2019 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seluruh aparatur secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2019.
4. Renja Tahun 2019 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Putussibau, 21 Agustus 2018
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu,



DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19710312 199101 1 001